

KONFLIK SOSIAL PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA RANDUAGUNG KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG

Saichi Gusai Nurilahi¹, Emy Kholifah²

Universitas Muhammadiyah Jember¹²

saichisauqi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyse social conflicts after the village head election (Pilkades) in Randuagung village, Randuagung sub-district, Lumajang district. The conflicts that occurred included various forms, such as money politics, riots, threats, and theft of livestock. The research method used was descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results showed that post-election conflicts were caused by factors such as dissatisfaction with the election results, fraudulent practices, political polarisation, and weak law enforcement. Lewis A. Coser's conflict theory was used to analyse conflict dynamics, which revealed that the conflict was both realistic (based on political interests) and non-realistic (triggered by emotions and revenge). The impacts of conflict include disruption of social harmony, psychological trauma, and economic losses. This research recommends strengthening Pilkades monitoring mechanisms, local wisdom-based political education, and reconciliation approaches to restore social relations in the community. The findings make an important contribution to the understanding of the dynamics of political conflict at the village level and sustainable conflict resolution efforts.

Keywords: Social Conflict, Pilkades, Money Politics, Reconciliation, Randuagung Village.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik sosial pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Konflik yang terjadi meliputi berbagai bentuk, seperti *money politics*, kerusuhan, pengancaman, dan pencurian hewan ternak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa konflik pasca-Pilkades disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, praktik kecurangan, polarisasi politik, serta lemahnya penegakan hukum. Teori konflik Lewis A. Coser digunakan untuk menganalisis dinamika konflik, yang mengungkapkan bahwa konflik tersebut bersifat realistik (berbasis kepentingan politik) dan non-realistik (dipicu oleh emosi dan balas dendam). Dampak konflik meliputi terganggunya keharmonisan sosial, trauma psikologis, dan kerugian ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan Pilkades, pendidikan politik berbasis kearifan lokal, serta pendekatan rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang dinamika konflik politik di tingkat desa dan upaya resolusi konflik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Politik, Pilkades, *Money Politics*, Rekonsiliasi, Desa Randuagung.

PENDAHULUAN

Salah satu contoh pemulihan hak dasar masyarakat untuk memilih pemimpin desa adalah pemilihan kepala desa secara langsung. Dengan begitu, masyarakat secara bebas disodori calon-calon kepala desa yang akan memimpin wilayahnya, sehingga masyarakat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Kampanye politik dan pemilihan kepala desa tentu saja merupakan hal yang sama, karena calon kepala desa yang akan dipilih adalah mereka yang mampu memajukan desa (Fuadi, 2020).

Bagian yang paling menarik dari proses pemilihan kepala desa adalah tahap kampanye, ketika setiap kandidat berlomba-lomba memperkenalkan diri, membuat janji-janji, melibatkan masyarakat desa, dan menggunakan berbagai strategi komunikasi politik lainnya, baik secara langsung maupun melalui tim sukses mereka (Maulana et al., 2020).

Pemilihan kepala desa merupakan arena politik demokrasi, dimana masyarakat seharusnya memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya. Namun disisi lain ketika praktek demokrasi sudah dilaksanakan dijumpai kekecewaan oleh sebagian masyarakat yang khawatir akan ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dalam pemilihan kepala desa seringkali menjadi konflik kekerasan dan anarkis (Wance & Ibrahim, 2019).

Dibandingkan dengan pemilihan umum lainnya, Pilkades lebih terfokus karena jarak yang dekat dan interaksi langsung antara kandidat dan pemilih. Oleh karena itu, iklim politik di sana sering kali lebih panas dibandingkan dengan pemilu lainnya. Perkenalan atau sosialisasi kandidat tidak lagi terlalu diperlukan. Setiap pemilih biasanya sudah mengenal para kandidat (Rivai, 2024).

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, yang menetapkan Pilkades, tujuannya bukan hanya untuk mengangkat seseorang menjadi kepala desa, tetapi juga untuk memperebutkan sumber daya lainnya, khususnya anggaran desa. Karena ketegangan ini, setiap pilkades sering kali diwarnai dengan perselisihan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, di antara para pendukung dan penentang (Falah & Fauzi, 2021).

Fenomena ini juga patut dicermati dalam konteks pemilihan kepala desa di Desa Randuagung, yang merupakan proses politik yang mendebarakan di mana para kandidat bersaing memperebutkan posisi kepala desa dengan menjanjikan berbagai hal dan melakukan politik uang, yaitu memberikan uang kepada warga dengan harapan warga mendukung pencalonan mereka. Dalam pemilihan kepala desa di Desa Randuagung terdapat 2 calon kandidat yaitu, Ahmad hoiri dan Imam syahroni. dari kedua calon tersebut Ahmad hoiri adalah kepala desa sebelumnya dan mencalonkan diri untuk kedua kalinya, maka mayoritas masyarakat yang puas dengan hasil kerja Ahmad hoiri, lebih memilih lagi untuk melanjutkan membangun desa.

Dari perhitungan suara Ahmad hoiri lebih unggul karena mendapatkan polling suara lebih banyak dari Imam syahroni. Maka berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS tersebut sudah jelas jika Ahmad hoiri yang berhasil menjadi kepala desa untuk kedua kalinya. berdasarkan pengamatan langsung di lapangan penulis menemukan adanya konflik yang terjadi setelah proses pemilihan kepala desa, dari pihak yang kurang puas dengan hasil perhitungan yaitu adanya ancaman terhadap penduduk yang memilih paslon no 1 untuk lanjut 3 periode, adapun bentuk ancaman adalah kekerasan fisik hingga harta bendanya, contohnya seperti pengeroyokan hingga pembacokan yang dilakukan oleh pihak yang merasa kurang puas dan ingin menjatuhkan kepala desa yang terpilih, dengan cara mencuri hewan ternak satu per satu sehingga membuat masyarakat takut. memang tidak bisa di bohongi mayoritas warga desa rata

rata suku madura, yang dimana kekalahan dari suatu pihak adalah sebuah penghinaan menurut mereka, jadi mereka menghalalkan segala cara supaya.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Konflik

Dalam masyarakat, konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial antara dua pihak yang ditandai dengan adanya tekanan, pengrusakan, dan saling membahayakan. Menurut KBBI, kata konflik berasal dari bahasa Latin yang berarti bertabrakan, berbenturan, berbenturan, bersaing, bertempur, berdebat, atau bertengkar (Lating et al., 2017). Pandangan konflik menyatakan bahwa politik pada dasarnya adalah konflik karena konflik adalah hasil dari pertemuan dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang relatif sama dalam suatu isu yang sempit. Pandangan ini sah karena konflik merupakan gejala masyarakat secara keseluruhan, termasuk sistem politik. Konflik juga merupakan hasil sampingan yang wajar dari proses politik (Taufik & Hamrun, 2018).

Transformasi sosial dan konflik berjalan beriringan. Perubahan sosial bukanlah konsekuensi dari perubahan nilai, melainkan hasil dari perjuangan yang mengarah pada konsesi yang menyimpang dari keadaan awal. Sering diakui bahwa perubahan sosial adalah gejala alamiah dari semua masyarakat. Terciptanya faktor-faktor yang dapat menjadi sumber konflik dalam masyarakat disebabkan oleh dominasi beberapa individu atas individu lainnya. Konflik adalah gejala yang tidak dapat dihindari dan normal (Kholifah, 2015).

2. Teori Konflik Menurut Lewis A. Coser

Dahrendorf mengakui pentingnya karya Lewis Coser, Coser menunjukkan peran yang dimainkan oleh konflik dalam struktur sosial. Dia juga membantah gagasan bahwa integrasi sosial hanya dapat dicapai dengan kerja sama dan konsensus. Coser menegaskan bahwa konfrontasi tidak selalu buruk. Karena konflik menciptakan perubahan sosial, konflik memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat (Ahmad, 2016).

Terdapat beberapa pemikiran Coser yakni:

1. Katup Penyelamat

Salah satu pertahanan unik terhadap potensi konflik sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah katup pengaman. Konflik berfungsi sebagai “katup penyelamat” yang memungkinkan kelebihan permusuhan diarahkan tanpa menghancurkan seluruh struktur dan membantu “menjernihkan suasana” dalam kelompok yang sedang berantakan. Menurut Coser, katup pengaman adalah cara untuk meredakan permusuhan, yang jika tidak, akan menyebabkan ketegangan di antara pihak-pihak yang berlawanan semakin parah. Salah satu strategi unik untuk melindungi suatu kelompok dari potensi konflik sosial adalah Katup Penyelamat (Nafisah et al., 2024).

Sebuah lembaga untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap suatu sistem atau organisasi adalah katup penyelamat. Coser berpendapat bahwa katup penyelamat mencegah permusuhan berbalik melawan target awalnya. Namun, substitusi semacam itu memiliki biaya bagi orang dan sistem sosial: mengurangi kebutuhan untuk menyesuaikan sistem dengan keadaan yang berubah dan mengurangi konflik internal, yang meningkatkan risiko ledakan yang merusak.

2. Konflik Realistis dan Nonrealistis

Coser membuat perbedaan antara konflik yang nyata dan konflik yang tidak nyata. Konflik yang realistis memiliki asal-usul yang nyata, seperti perebutan wilayah atau sumber daya keuangan. Sengketa ini akan segera diselesaikan dengan baik jika mereka telah mengidentifikasi penyebab masalah dan jika dapat diperoleh tanpa menggunakan kekerasan. Keinginan yang tidak rasional memicu konflik yang tidak realistis, yang biasanya bersifat ideologis dan mencakup perselisihan antara agama, kelompok etnis, dan sistem kepercayaan yang berbeda. Entah itu disahkan atau tidak, konflik adalah tujuan dari konflik itu sendiri. Konflik yang tidak realistis merupakan jenis kekerasan yang benar-benar diambil dari sumber lain dan digunakan untuk meredakan ketegangan atau menyoroti identitas suatu kelompok. Di antara jenis konflik yang pertama dan kedua, konflik nonrealistis biasanya merupakan konflik yang paling sulit untuk diselesaikan; mencapai kesepakatan dan mencapai perdamaian akan menjadi tantangan tersendiri. Menurut Coser, perselisihan dapat menimbulkan kedua jenis konflik tersebut secara bersamaan, menciptakan skenario konflik yang lebih rumit (Coser, 1957) dalam (Maula, 2022).

3. Permusuhan dalam Hubungan Sosial

Coser menegaskan bahwa seseorang dapat berpartisipasi dalam perselisihan yang sebenarnya tanpa bertindak agresif atau bermusuhan. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan dua orang pengacara yang berteman baik selama menjadi mahasiswa. Setelah lulus dan menjadi pengacara, mereka menghadapi dilema yang memaksa mereka untuk tampil di pengadilan melawan satu sama lain. Meskipun masing-masing dengan penuh semangat dan susah payah membela kepentingan kliennya, mereka melupakan perselisihan mereka dan pergi ke restoran untuk mengenang masa lalu yang indah (Lantarno et al., 2023).

Hubungan yang bersifat parsial atau tersegmentasi, dibandingkan dengan hubungan yang melibatkan anggota secara keseluruhan, biasanya merupakan hubungan yang konfliknya tidak diikuti oleh kebencian. Perbedaan antara konflik yang nyata dan tidak nyata lebih sulit untuk ditegakkan ketika konflik tersebut muncul dalam hubungan yang dekat. Menurut Coser, semakin kuat rasa kasih sayang yang tertanam dalam sebuah hubungan, semakin besar kemungkinan permusuhan akan ditekan daripada diekspresikan. Kemarahan dapat diekspresikan secara terbuka dalam hubungan sekunder, termasuk hubungan dengan mitra bisnis. Hal ini tidak selalu terjadi pada kemitraan utama, di mana keterlibatan penuh kedua belah pihak membuat hubungan menjadi berisiko untuk menyuarakan perasaan seperti itu. ketika perselisihan menjadi begitu intens sehingga meledak, membahayakan kemitraan. Contohnya termasuk perselisihan antara kekasih dan antara suami dan istri.

4. Isu Fungsionalitas Konflik Coser

Mengutip temuan Simmel yang membantu meredakan konflik kelompok. lebih banyak konflik kelompok dapat dihubungkan dengan lebih banyak hubungan dengan masyarakat luas, ia berpendapat, mengutip data dari pengamatan terhadap komunitas Yahudi. Kurangnya konflik dalam kelompok merupakan tanda integrasi sosial kelompok yang buruk. Hubungan yang sehat ditunjukkan dengan adanya konflik dalam kelompok, terlepas dari besar kecilnya organisasi. Coser dengan tegas menentang para sosiolog yang hanya memandang konflik secara negatif. Perbedaan adalah hal yang biasa terjadi dan berpotensi memperkuat struktur sosial. Oleh karena itu, Coser tidak setuju dengan gagasan bahwa stabilitas dan kekuatan suatu hubungan dapat ditentukan oleh minimnya konflik.

Konflik dengan kelompok luar akan membantu menetapkan batas-batas struktural, menurut Coser. Sebaliknya, konflik dengan kelompok luar juga dapat meningkatkan kohesivitas

kelompok. Coser berpendapat bahwa hubungan timbal balik yang paling signifikan mengenai apakah konflik dapat meningkatkan kohesi kelompok adalah "tingkat konsensus kelompok sebelum konflik terjadi. "Menurut Coser, penerimaan penuh dari setiap aspek kehidupan kelompok diperlukan untuk kohesi sosial dalam organisasi seperti sekte. Sebuah kelompok "mirip sekte" dengan hubungan yang erat mungkin bergantung pada musuh dari luar untuk bertahan hidup.

METODE PENELITIAN

Mengingat kekerasan yang berlarut-larut di daerah tersebut setelah pemilihan kepala desa pada 18 Desember 2019, penelitian ini dilakukan di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai gejala konflik sosial, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Strategi deskriptif kualitatif adalah strategi yang mengumpulkan informasi dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari tindakan yang mereka amati. Pihak-pihak yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini dianggap memiliki data yang dibutuhkan untuk topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Money Politic

Berdasarkan data lapangan yang dihimpun melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, termasuk FG dan H, terungkap bahwa praktik money politics telah menjadi salah satu persoalan sistemik yang mengakar dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks persaingan politik yang sangat kompetitif di tingkat desa, di mana masing-masing pasangan calon (paslon) berupaya mengamankan suara dengan segala cara. Dalam situasi semacam itu, pendekatan transaksional menjadi instrumen yang dianggap paling efektif untuk menggalang dukungan, terutama di tengah kondisi sosial ekonomi warga yang relatif rentan terhadap iming-iming materiil. Menurut penuturan FG, seorang tokoh masyarakat setempat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, praktik pemberian uang kepada pemilih berlangsung secara masif, terstruktur, dan sangat terorganisir.

Pernyataan ini diperkuat oleh informan berinisial H, seorang warga biasa, yang mengaku menerima uang tunai antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dari seseorang yang mengaku sebagai relawan salah satu paslon. Pengakuan ini menggambarkan bahwa praktik vote buying telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya melalui pendekatan massal, tetapi juga dengan menyasar individu secara personal.

Salah satu temuan paling mencolok dari penelitian ini adalah keberadaan pola pembagian peran yang sangat jelas dan terstruktur dalam tubuh tim sukses. Di tingkat atas, terdapat koordinator desa yang membawahi beberapa koordinator dusun. Masing-masing koordinator dusun kemudian mengoordinasikan relawan lapangan yang bertugas mendatangi pemilih satu per satu. Menurut keterangan informan berinisial J, mereka bahkan memiliki sistem pencatatan internal yang rinci mengenai siapa saja yang telah menerima uang dan siapa yang belum, lengkap dengan informasi lokasi dan waktu kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa money politics di Randuagung tidak dilakukan secara spontan atau insidental, melainkan sebagai bagian dari strategi elektoral yang dirancang secara sistematis dan profesional.

2. Kerusuhan

Kerusuhan yang terjadi pasca-pilkades di Desa Randuagung merupakan manifestasi dari dinamika sosial-politik yang kompleks di tingkat lokal. Desa Randuagung memiliki karakteristik historis dan sosial yang khas, dengan tingkat heterogenitas tinggi serta struktur masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok kekerabatan besar. Polarisasi politik yang terbentuk selama proses sejarah desa menciptakan dukungan politik yang cenderung bersifat primordial. Dalam tiga siklus pemilihan kepala desa terakhir, ketegangan antar kelompok ini menunjukkan pola kompetisi yang semakin mengeras dan berulang, sehingga menciptakan potensi konflik yang laten dan struktural.

Kerusuhan yang terjadi dibagi ke dalam tiga fase utama. Pada fase pertama (pra-pemilihan), ketegangan mulai muncul ketika masing-masing calon kepala desa bersaing dalam membentuk tim sukses yang terdiri dari tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh. Persaingan ini memperlihatkan gejala eksklusivitas dan praktik-praktik money politics, seperti distribusi bantuan sosial yang tidak merata. Fase kedua berlangsung pada hari pemungutan suara, yang diwarnai dengan pelanggaran prosedural di beberapa TPS, khususnya terkait daftar pemilih dan

proses penghitungan. Sejumlah saksi melaporkan adanya tekanan untuk menandatangani berita acara meskipun terdapat kejanggalan. Fase ketiga terjadi setelah pengumuman hasil sementara yang menunjukkan keunggulan salah satu pasangan calon. Reaksi protes dari pendukung calon yang tidak menerima hasil tersebut awalnya berlangsung damai, namun kemudian berubah menjadi kerusuhan setelah beredar informasi mengenai adanya kotak suara yang belum dihitung.

3. Pengancaman

Pasca penyelenggaraan Pilkades di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, muncul fenomena pengancaman yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Desa yang sebelumnya dikenal dengan kerukunan warganya ini mengalami perubahan drastis dalam dinamika sosialnya setelah pemilihan kepala desa. Polarisasi politik yang terjadi selama masa kampanye ternyata tidak berhenti ketika pemilihan usai, melainkan berlanjut dalam bentuk tindakan intimidasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan aparat desa, terungkap bahwa ketegangan pasca pemilihan telah menciptakan suasana tidak nyaman di berbagai lapisan masyarakat. Kasus-kasus pengancaman mulai muncul tidak berselang sehari setelah penetapan hasil pemilihan, menunjukkan pola yang sistematis dan terorganisir. Modus operandi pelaku bervariasi dari ancaman langsung secara verbal di tempat umum, pesan singkat bernada intimidasi, hingga aksi vandalisme terhadap properti milik pendukung paslon tertentu.

Kasus paling serius terjadi ketika rumah salah satu anggota panitia pemilihan dilempari batu pada malam hari, menimbulkan trauma mendalam bagi seluruh anggota keluarganya. Aksi-aksi intimidasi ini tidak hanya menargetkan pendukung paslon tertentu, tetapi juga menjangkau keluarga dan kerabat dekat mereka.

Aktor di balik aksi pengancaman ini terdiri dari berbagai elemen dengan motivasi yang berbeda-beda. Kelompok inti terdiri dari pendukung fanatik paslon yang kalah, yang melakukan aksi intimidasi didorong oleh kekecewaan politik yang mendalam. Kelompok kedua adalah preman bayaran yang sengaja direkrut oleh oknum tertentu untuk menekan lawan politiknya. Yang lebih memprihatinkan, terdapat indikasi kuat keterlibatan mantan aparat desa dalam jaringan intimidasi ini, dimana mereka memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang struktur sosial desa untuk menargetkan korban secara tepat. Pola rekrutmen pelaku

menunjukkan adanya eksploitasi terhadap kelompok pemuda yang kurang produktif secara ekonomi, yang dengan mudah direkrut dengan iming-iming materi.

Dampak dari kasus pengancaman ini telah meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada tingkat individu, beberapa korban mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan berlebihan dan kesulitan tidur. Di tingkat keluarga, muncul pembatasan aktivitas anggota keluarga tertentu karena kekhawatiran akan keselamatan. Pada tingkat komunitas yang lebih luas, terjadi perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial sehari-hari. Kegiatan kemasyarakatan tradisional seperti arisan dan pengajian mengalami penurunan partisipasi yang signifikan karena ketidaknyamanan suasana. Ruang publik desa yang sebelumnya menjadi tempat diskusi terbuka kini diwarnai oleh sikap hati-hati dalam menyampaikan pendapat, menunjukkan munculnya budaya *self-censorship* di kalangan warga.

4. Pencurian

Pilkades yang semestinya menjadi ajang demokrasi lokal untuk memilih pemimpin yang dipercaya masyarakat, justru memunculkan friksi dan konflik horizontal yang cukup dalam. Dalam pemilihan tersebut, terdapat dua calon kepala desa yang bersaing cukup ketat. Keduanya memiliki basis pendukung yang kuat, dan selama masa kampanye, kompetisi antarpengukung sudah mulai menunjukkan potensi konflik. Berbagai isu dan fitnah sempat beredar di masyarakat, yang memperkeruh suasana. Ketika hasil Pilkades diumumkan dan salah satu calon dinyatakan menang, kelompok pendukung calon yang kalah menunjukkan reaksi yang kurang dapat dikendalikan. Mereka merasa hasil Pilkades tidak mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya, dan bahkan muncul dugaan kecurangan, meskipun tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut.

Ketegangan tersebut kemudian memunculkan bentuk-bentuk protes yang tidak tersalurkan melalui jalur yang sah dan damai. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan pasca Pilkades, terjadi serangkaian pencurian hewan ternak yang menggegerkan warga. Berdasarkan laporan dari perangkat desa dan hasil wawancara dengan korban serta saksi mata, aksi pencurian dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Modus pencurian dilakukan pada malam hari, ketika warga sedang beristirahat, dan sasaran utamanya adalah kandang ternak milik warga yang diketahui secara terbuka mendukung calon yang menang. Fenomena ini

memperkuat dugaan bahwa pencurian tidak hanya bermotif ekonomi, melainkan juga sebagai aksi balas dendam terhadap masyarakat yang dianggap bertanggung jawab atas kekalahan calon yang mereka dukung.

Jika dilihat dari perspektif kriminologi, tindakan pencurian ini tidak bisa semata-mata diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal biasa. Ini merupakan contoh dari apa yang disebut sebagai kriminalitas instrumental, yakni kejahatan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar kepentingan ekonomi semata. Dalam kasus ini, pencurian ternak menjadi ekspresi dari kekecewaan, amarah, dan keputusan kelompok yang kalah secara politik. Kejahatan ini memiliki dimensi simbolik: menyerang sumber penghidupan warga yang dianggap sebagai lawan politik adalah bentuk intimidasi dan upaya menebar ketakutan. Hal ini menunjukkan bagaimana proses politik yang tidak sehat dapat melahirkan tindakan-tindakan destruktif yang merusak tatanan sosial dan hukum.

Pihak pemerintah desa dan aparat keamanan telah mencoba merespons situasi ini dengan melakukan berbagai langkah. Kepolisian melakukan patroli rutin di malam hari dan meningkatkan intensitas penjagaan. Namun, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif. Oleh karena itu, pemerintah desa juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat dalam upaya mediasi dan rekonsiliasi sosial. Pertemuan-pertemuan warga mulai digelar untuk membahas permasalahan ini secara terbuka, dengan harapan masyarakat bisa kembali hidup dalam suasana damai dan saling percaya. Dalam beberapa kasus, proses mediasi ini berhasil mendinginkan suasana dan mendorong warga untuk tidak lagi saling menyalahkan.

KESIMPULAN

Konflik sosial pasca pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Randuagung merupakan manifestasi dari berbagai bentuk ketegangan sosial dan politik yang berakar pada lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi, rendahnya integritas proses pemilihan, serta kuatnya pengaruh struktur sosial dan budaya lokal yang mendukung praktik-praktik tidak sehat dalam kontestasi politik. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat verbal atau simbolik, namun juga menjurus ke arah kekerasan fisik, pengrusakan, pengancaman, hingga kriminalitas seperti pencurian. Bentuk konflik ini semakin diperparah dengan adanya praktik money

politics, kecurangan panitia, serta kegagalan dalam penyelenggaraan pemilihan yang transparan dan adil. Dari sisi teoritis, temuan ini menunjukkan relevansi teori konflik sosial Lewis A. Coser, bahwa konflik yang tidak disalurkan dengan mekanisme resolusi yang sehat dapat memicu disintegrasi sosial dan memperparah ketegangan antar kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2016). KONFLIK DALAM DINAMIKA POLITIK PERDESAAN (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB). *Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi*, 6.
- Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology*, 8.
- Falah, M. F., & Fauzi, A. M. (2021). Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6.
- Fuadi, S. H. (2020). RESOLUSI KONFLIK SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA BAJANG MLARAK PONOROGO. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2, 86–111.
- Kholifah, E. (2015). *Resolusi Konflik "Sunni-Syiah" di Puger Kulon Berbasis Kearifan Lokal. Mencari Metodologi Penelitian Islami*.
- Lantarno, Mukari, & Tazid, A. (2023). Transformasi Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Ngudirejo Diwek Jombang. *JOURNAL OF PUBLIC POWER*, 7.
- Lating, A., Suaib, R., & Suhu, B. La. (2017). KONFLIK SOSIAL ANTAR MASYARAKAT PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan). *KWASA*, 7.
- Maula, A. I. (2022). KOMUNIKASI POLITIK MUI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Keterlibatan MUI dan Konflik Pilkades di Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor). *TABAYYUN JURNAL KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM*, 3.
- Maulana, A., Khawirian, W., & Arditi, N. M. (2020). Strategi Pembangunan Desa Melalui Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Desa Sumberketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata*.

- Nafisah, K., Tazid, A., & Mukar. (2024). KONFLIK PENCALONAN PILKADES 2019 (Studi Kasus di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang). *DROMOLOGI: Journal of Sociology and Humanities*, 1.
- Rivai, A. T. S. (2024). KONFLIK SOSIAL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TAWA KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin*.
- Taufik, A., & Hamrun. (2018). Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng. *JURNAL POLITIKOM INDONESIA*, 3.
- Wance, M., & Ibrahim, A. H. H. (2019). Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. *Ournal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1.